



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DYAH LUKISARI**
2. Jabatan : **KEPALA BIRO**
3. NHK : **216734**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.471.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/170 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 560 m2/250 m2 di BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
3. Tanah Seluas 470 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 82.000.000
4. Tanah Seluas 120 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 52.000.000
5. Tanah Seluas 120 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 52.000.000
6. Tanah Seluas 130 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 57.000.000
7. Tanah Seluas 123 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 53.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 266.900.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 3.450.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 3.450.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA VELOZ 1.5 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
4. MOBIL, TOYOTA AVANZA VELOZ 1.3 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	23.130.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	835.861.781
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.596.891.781
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.596.891.781

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.